

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan negara penganut sistem demokrasi, artinya rakyat diberikan kesempatan besar untuk turut berpartisipasi dalam proses pemilihan pejabat pemerintahan. Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagai ajang demokrasi di tingkat desa ternyata memiliki potensi kecurangan yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan tidak efektifnya pengawasan Pemilihan Kepala Desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem dan konstruksi hukum pengawasan Pemilihan Kepala Desa di Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan historis yang didasarkan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa tugas pengawasan Pemilihan Kepala Desa serentak yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 masih dibebankan kepada Panitia Pemilihan. Berlakunya dua fungsi tugas secara bersamaan terhadap Panitia Pemilihan yakni sebagai pelaksana penyelenggaraan dan sebagai pelaksana pengawasan berdampak pada besarnya potensi kecurangan terhadap Pemilihan Kepala Desa di Indonesia.

Kata Kunci : Pengawasan, Pemilihan, Kepala Desa

ABSTRACT

Indonesia is a country that adheres to a democratic system, meaning that the people are given a great opportunity to participate in electing government. In implementing Village Head Elections as an arena for democracy at the village level, it turns out that there is a high potential for fraud. This is due to the ineffective supervision of the Election of Village Heads regulated in laws and regulations. This study analyzes Indonesia's legal system and construction of Village Head Election supervision. This study used normative legal research methods, using statutory, conceptual, and historical approaches based on primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study indicated that the task of supervising the simultaneous Village Head Elections regulated in the Minister of Home Affairs Regulation Number 65 of 2017 and the Minister of Home Affairs Regulation Number 72 of 2020 is still borne by the Election Committee. The simultaneous application of two task functions to the Election Committee, namely as executor of implementation and executor of supervision, impacts the magnitude of the potential for fraud in the Election of Village Heads in Indonesia.

Keywords : Supervision, Election, Head of Village